

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Organisasi Keagamaan Masyarakat

2.1.1 Definisi Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan adalah sekelompok orang yang memiliki doktrin, praktik, dan keyakinan agama yang serupa. Mereka dikelola oleh struktur organisasi yang memungkinkan mereka merencanakan acara dan mengelola keanggotaannya. Orang-orang yang bertugas menyelenggarakan ibadah, ritual, dan ajaran agama dalam organisasi ini biasanya dikelompokkan ke dalam hierarki kepemimpinan, yang dapat mencakup imam, pendeta, atau pemimpin agama lainnya. Masjid, gereja, kuil, vihara, dan tempat ibadah lainnya merupakan contoh organisasi keagamaan. Lembaga-lembaga ini mungkin juga memiliki cabang lokal, regional, atau nasional. Selain itu, kelompok agama dapat melakukan kegiatan amal, sosial, pendidikan, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan prinsip agamanya.¹⁶

Organisasi juga dikenal dalam masyarakat sebagai sistem terbuka yang terdiri dari subsistem yang saling bergantung yang berinteraksi satu sama lain dan dengan dunia luar melalui proses pertukaran input-output agar dapat bertahan hidup. Agar suatu organisasi dapat beroperasi secara efisien, subsistemnya harus bekerja sama satu sama lain dan terintegrasi. Menurut gagasan ini, setiap komponen atau struktur dalam suatu organisasi memiliki tujuan tertentu dalam menjaga stabilitas dan keseimbangan sistem organisasi. Untuk menjamin kelangsungan hidup organisasi, setiap fungsi yang ada di dalamnya saling berhubungan dan saling mendukung. Suatu organisasi dapat menjadi tidak berfungsi dan kehilangan keseimbangan jika salah satu fungsinya tidak berfungsi dengan baik. Aspek struktur, fungsi, dan normatif dalam organisasi. Meskipun mendapat banyak kritik, teori ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman kita tentang

¹⁶ Herien Puspitawati, "Konsep, Tori Dan Analisis Gender," 2013, 1013.

organisasi sebagai sistem sosial yang dibangun secara rumit dengan bagian-bagian yang saling berhubungan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup organisasi.¹⁷

Setiap komponen atau struktur dalam suatu organisasi mempunyai tujuan tertentu untuk menjaga kelangsungan hidup dan keseimbangan sistem secara keseluruhan. Suatu organisasi juga dapat bertahan dan bekerja dengan baik dengan memiliki kapasitas dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar dirinya agar dapat beradaptasi, kapasitas untuk menetapkan dan memenuhi tujuan organisasi, kapasitas untuk menggabungkan anggota organisasi dan subsistem, kapasitas untuk menjunjung tinggi budaya, standar, dan nilai-nilai yang ada pada suatu organisasi.¹⁸

Pentingnya spesialisasi tugas dan pembagian kerja dalam organisasi untuk meningkatkan efisiensi. Struktur organisasi dan hierarki kekuasaan yang berbeda menjadi dasar pembagian kerja. Stabilitas dan ketertiban organisasi diperkirakan bergantung pada kesesuaian terhadap pentingnya menjaga keseimbangan sistem organisasi. Dengan melengkapi persyaratan fungsional dan mengintegrasikan subsistem saat ini, keseimbangan ini tercapai. Organisasi juga dapat mengalami perubahan sebagai reaksi terhadap perubahan lingkungan eksternal, meskipun ia lebih menekankan pada komponen stabilitas. Untuk menjaga keseimbangan sistem, modifikasi ini harus dilaksanakan secara terencana dan diatur.¹⁹

Orientasi nilai sangat penting bagi organisasi, karena perilaku anggota organisasi dipengaruhi oleh prinsip-prinsip dengan menggunakan nilai-nilai sebagai panduan untuk membantu mencapai tujuan suatu organisasi. Ada empat orientasi yang dapat diklasifikasikan dalam organisasi yaitu; berorientasi pada keuntungan, berorientasi pada layanan, berorientasi pada penegakan hukum, dan berorientasi pada ekspresi. Kategori-kategori ini didasarkan pada orientasi

¹⁷ Yuni Sulistiyowati, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Dan Tata Sosial" 2 (2020): 2–11.

¹⁸ Efendi Rustan, "Kesetaraan Gender Dalam Pendidikan," *Al-Maiyyah* 7 (2014): 1–21.

¹⁹ Laurentius Tinambunan, "Persoalan Manusia Dan Tubuhnya," *Filsafat Teologi* 21 (2024): 2–21.

organisasi terhadap nilai-nilai tertentu. Maka dengan adanya orientasi tersebut akan semakin kompleks fungsi dalam organisasi tersebut.²⁰

Untuk memberikan koordinasi dan pengawasan yang efisien, kekuasaan dan wewenang dalam organisasi perlu dialokasikan secara hierarki.²¹ Namun pentingnya otoritas ini dipandang sah oleh orang-orang yang membentuk organisasi tersebut karena organisasi adalah sistem terbuka yang berhubungan dengan lingkungannya.²² Maka betapa pentingnya bagi sebuah organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan di lingkungannya agar dapat terus eksis. Tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik dalam kelompok, meskipun menekankan ciri-ciri stabilitas dan konsensus seperti ketidakseimbangan alokasi sumber daya dalam suatu organisasi atau ketidakselarasan antara tujuan pribadi dan tujuan organisasi dapat menimbulkan konflik dan apakah lingkungan internal atau eksternal berubah, suatu organisasi mungkin juga harus beradaptasi. Namun untuk menjaga keseimbangan struktur organisasi, perubahan harus dilaksanakan secara terencana dan terkendali.²³

Dalam islam sendiri terdapat organisasi sendiri. Organisasi Islam merupakan suatu perkumpulan atau badan yang didirikan dengan tujuan untuk mengembangkan dan menyebarkan ajaran Islam, serta memperjuangkan kepentingan umat muslim.²⁴ Organisasi Islam berfungsi sebagai platform untuk menyatukan umat Islam untuk bekerja mencapai tujuan bersama yang sejalan dengan ajaran Islam.²⁵ Mereka juga dapat digunakan untuk merencanakan inisiatif untuk mendorong kemajuan umat Islam di berbagai bidang, termasuk sosial, politik, ekonomi, dan pendidikan, serta untuk menegakkan hukum Islam. Organisasi Islam secara konsisten menerapkan prinsip dan ajaran Islam dalam kerangka berbangsa,

²⁰ Li He, *The Construction of Gender: Judith Butler and Gender Performativity*, 2017.

²¹ Berbasis Agama et al., "Yusuf-Pengaruh-Negara-Dan-Organisasi-Keagamaan" 39, no. 1 (n.d.): 49–73.

²² Cinta Aulia Putri et al., "Pengaruh Nilai Nilai Agama Islam Dalam Membentuk Strategi Komunikasi Organisasi Keagamaan" 2, no. 1 (2024): 1–2.

²³ Agama Dan and Organisasi Keagamaan, "Sosiologi Agama," n.d.

²⁴ HALMARELA SIREGAR, "Program Studi Pendidikan Agama Islam," *Metodelogi Penelitian* 5, no. 2 (2018): 81, <https://doi.org/10.53649/taujih.v3i1.93>.

²⁵ Muhammad Kasim, "Organisasi Islam Dan Pengaruhnya Pada Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 2016.

bernegara, dan bermasyarakat. Selain itu, program ini berupaya untuk membentuk dan membimbing umat Islam agar mereka konsisten menghayati keyakinan Islam. Organisasi Islam menyediakan cara yang metodis dan terorganisir bagi umat Islam untuk membela hak dan kepentingan mereka.²⁶

Organisasi Islam memiliki sejarah yang panjang yang dimulai sejak masa Rasulullah SAW dan Khulafa'ur Rasyidin. Pada masa ini, belum ada organisasi Islam dalam bentuk modern. Namun komunitas muslim pertama terbentuk di madinah dibawah kepemimpinan Rasulullah SAW. Ini yang akan menjadi cikal bakal organisasi Islam yg terstruktur. Pada masa Dinasti Islam seperti Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, Dinasti Utsmaniyah, terdapat beberapa organisasi semi-formal yang mengembangkan pemikiran dan studi Islam, seperti halaqah (lingkaran studi), khanqah (pusat tarikat sufi) dan madrasah.²⁷

Gerakan kebangkitan Islam seperti Gerakan Salafiyah di Mesir dan Wahhabisme di Arab Saudi muncul pada abad ke-19. Dengan terbentuknya Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh yang mendirikan Jamaah Al-Ikhwan Al-Muslimin di Mesir pada tahun 1928, organisasi Islam kontemporer mulai bermunculan. Organisasi-organisasi Islam seperti Nahdhatul Ulama (NU), Muhammadiyah di Indonesia pada tahun 1926, Ikhwanul Muslimin di Mesir pada tahun 1928, Jamaah Islamiyah di Pakistan pada tahun 1941, dan lain-lain tumbuh pesat di dunia Islam pada abad ke-20. Kelompok-kelompok Islam menjadi semakin lazim di seluruh dunia, terutama di negara-negara barat. Sejumlah kelompok besar didirikan, termasuk Rabithah Alam Islami pada tahun 1972 dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) pada tahun 1969.²⁸

Kelompok-kelompok Islam berkembang dengan cepat dan dalam berbagai cara di zaman modern, baik secara domestik maupun global. Organisasi Islam, termasuk kelompok perempuan, pemuda, sosial, politik, dan pendidikan, masih terus berkembang dan mengejar berbagai tujuan. Pergantian kepemimpinan atau

²⁶ Kasim.

²⁷ Sri Sultarini Rahayu, "Peran Organisasi Islam Dalam Pengembangan Dan Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Universitas Nusantara PGRI Kediri* 01 (2017): 1–7.

²⁸ Muhammad Dahlan, "Motivasi Kebangkitan Dunia Islam," *Adabiyah* 15, no. 1 (2015): 1–8.

perpecahan internal terjadi pada organisasi tertentu. Secara umum, unsur sejarah, politik, budaya, dan intelektual di setiap lokasi memberikan dampak terhadap tumbuhnya kelompok Islam. Organisasi Islam sangat penting bagi kemajuan dan penyebaran keyakinan Islam secara global. Organisasi-organisasi Islam juga sangat dinamis dan beragam, mencerminkan kompleksitas dan kesulitan yang dialami umat Islam di dunia modern dan berfungsi sebagai suara penting bagi tujuan dan kepentingan umat Islam di seluruh dunia.²⁹

Organisasi Islam berupaya menyatukan umat Islam dalam mencapai tujuan tertentu yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Merencanakan acara untuk menegakkan hukum Islam dan memberi manfaat bagi komunitas Muslim. Mengamalkan ajaran dan cita-cita Islam dalam kehidupan sehari-hari. Mendorong umat Islam untuk mengikuti ajaran Islam setiap saat. Setelah itu, Anda bisa mengadakan kampanye untuk membela hak dan kepentingan umat Islam. Prinsip dasar organisasi Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Visi dan misi mereka saat ini juga harus sejalan dengan ajaran Islam, dan mereka juga harus memiliki struktur manajemen, program kerja, dan inisiatif sosialisasi yang terorganisir dengan baik untuk menyebarkan Islam.³⁰

Organisasi Islam hadir dalam berbagai bentuk. Kelompok ini mencakup kelompok agama seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama, kelompok sosial seperti Darul Arqam dan BKMT, kelompok pendidikan seperti PGNU (Persatuan Guru Nahdlatul Ulama), kelompok politik seperti Partai Keadilan Sejahtera, dan kelompok yang melibatkan pemuda dan mahasiswa. Organisasi Islam memegang peranan penting dan memberikan kontribusi positif terhadap kehidupan umat Islam di masyarakat. Mereka bekerja untuk memajukan ajaran Islam, membela hak dan kepentingan umat Islam, dan bekerja di bidang sosial, politik, ekonomi, dan

²⁹ Aflii Unique, "Peran Organisasi," no. 0 (2016): 1–23.

³⁰ Mardinal Tarigan et al., "Peradaban Islam : Masa Kebangkitan Kembali" 05, no. 04 (2023): 12175–89.

pendidikan. Bagi para pengikutnya, ini juga bisa menjadi platform yang kuat untuk persahabatan dan persaudaraan Islam.³¹

Salah satu organisasi islam dalam bentuk kelompok agama seperti Nahdhatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi islam terbesar di Indonesia yang berdiri pada tahun 1926. Organisasi islam di Indonesia mulai bermunculan pada awal abad ke-20, seiring dengan bangkitnya nasionalisme dan kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan dari penjajahan Belanda. Organisasi ini bertujuan untuk mempersatukan umat islam dan memperjuangkan kepentingan mereka dalam berbagai bidang kehidupan.³²

Nahdhatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh para ulama dan tokoh islam tradisional. Tujuan utama berdirinya NU adalah untuk mempersatukan para ulama dan pengikut paham Ahlussunnah wal Jamaah (Sunni) serta melestarikan ajaran islam tradisional di Nusantara. Pada awalnya, berdiri NU mendapat penentangan dari kalangan modernis muslim yang menganggap NU terlalu tradisional dan tidak sesuai dengan semangat pembaruan islam. Namun, NU tetap konsisten dengan paham dan tradisi dianutnya.³³

Nahdhatul Ulama (NU) didirikan oleh para ulama dan tokoh muslim tradisional, seperti KH. Hasyim Asy'ari, KH. Wahab Hasbullah, KH. Bisri Syansuri, KH. Ridwan, dan lain-lain. KH. Hasyim Asy'ari menjadi Rais Akbar (Pemimpin Tertinggi) pertama NU. NU berpegang pada paham Ahlussunnah wal Jamaah yang mengikuti salah satu dari tempat madzhab fikih yaitu, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. NU juga melestarikan tradisi dan kebudayaan islam nusantara seperti tahlilan, yasinan, dan praktik-praktik lainnya.³⁴

³¹ Usiono & Ahmad Syukri Sitorus, *Kontribusi Ormas Islam Dalam Mewujudkan Umat Islam Berkeunggulan Di Abad Ke 21*, 2015.

³² Tri Ramdhan Wahyudi, "FIKIH ORGANISASI (Reaktualisasi Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia)," *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (2019): 39–53.

³³ Andi Achruh Nasrullah, Bahaking Rama, "Nahdlatul Ulama, Tokoh Dan Kegiatannya Dalam Dunia Pendidikan," *Nizam: Jurnal Islampedia* 6094 (2023): 21–28.

³⁴ Fatkhul Mubin, "SEJARAH DAN KIPRAH NAHDLATUL ULAMA DI INDONESIA" 3, no. 1 (2019): 1–15.

Nahdhatul Ulama (NU) memberikan kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Banyak tokoh NU yang terlibat dalam organisasi perjuangan seperti Hizbullah dan Sabilillah. NU juga mendukung proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Setelah Indonesia merdeka, NU mengalami dinamika internal seperti perpecahan dan perbedaan pandangan tentang hubungan NU dengan politik praktis. Namun, NU tetap menjadi organisasi Islam berpengaruh dengan basis massa yang besar di Indonesia. Selain kontribusi politik, NU juga memberikan kontribusi besar dalam bidang sosial-budaya, seperti mendirikan lembaga pendidikan pesantren, melestarikan tradisi dan budaya Islam Nusantara, serta berperan aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.³⁵

Nahdhatul Ulama juga terbagi menjadi beberapa kelompok, salah satunya IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdhatul Ulama)³⁶.

1. Sifat-sifat Organisasi Keagamaan

Organisasi keagamaan merupakan sebuah lembaga atau badan yang didirikan untuk mempromosikan, memelihara, dan mengelola aspek-aspek keagamaan dalam masyarakat. Organisasi keagamaan juga biasanya terdiri dari sekelompok individu yang berbagi keyakinan dan praktek keagamaan yang sama dan memiliki berbagai sifat dan karakteristik yang membedakannya dari organisasi lain. Seperti halnya pada sifatnya yang berbasis keyakinan, di mana organisasi keagamaan didirikan atas dasar keyakinan dan doktrin agama tertentu. Keyakinan ini menjadi landasan utama dalam semua aktivitas dan tujuan organisasi. Hal itu juga menjadi misi besar setiap organisasi keagamaan terkhusus organisasi keagamaan yang memang dasar keyakinan dan doktrin dari suatu agama itu disandang oleh semua muslim dan membawa islam sebagai rahmat bagi seluruh alam.³⁷

³⁵ Amin Farid, "DALAM MEMPERJUANGKAN KEMERDEKAAN DAN MEMPERTAHANKAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (NKRI)" 24, no. 2 (2016): 251–84.

³⁶ Faisal Haitomi, Essyarovis Lutfiantoro Aji, and Laelatul Barokah, "Bias Patriarki Atas Interpretasi Ayat Nikah Beda Agama: Studi Historis-Linguistik Aksin Wijaya," *Qof* 7, no. 1 (2023): 133–42, <https://doi.org/10.30762/qof.v7i1.908>.

³⁷ Andi Purwono, "Beberapa Prinsip Dan Praktik Diplomasi Nahdlatul Ulama (NU) Indonesia," *Jurnal Politik Profetik* 2 (2013): 1–23.

Organisasi keagamaan juga memiliki sifat spiritual atau nilai spiritual yang biasanya didirikan untuk melayani dan mempromosikan ajaran agama tertentu. Seperti nilai-nilai spiritual Islam seperti kejujuran, kesederhanaan, tanggung jawab, keadilan dan keikhlasan dapat membentuk budaya organisasi yang sehat dan produktif. Nilai-nilai spiritual dalam organisasi keagamaan perlu dilakukan dengan pendekatan terstruktur dan komprehensif, yang melibatkan seluruh anggota organisasi untuk menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dan menerapkannya dalam praktik pengelolaan lembaga pendidikan sehari-hari. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas organisasi keagamaan Islam di Indonesia dan melalui organisasi keagamaan tersebut terbentuklah generasi yang berkarakter kuat dan bermoral tinggi.³⁸

Nilai spiritual yang ada pada sifat organisasi keagamaan mengacu pada pandangan bahwa organisasi harus didasarkan pada nilai-nilai spiritual agamanya dalam tata kelola dan praktiknya. Seperti halnya saja nilai spiritual dalam organisasi keagamaan berbasis Islam yang memiliki beberapa prinsip-prinsip seperti:

1. Tauhid, yang mengakui bahwa hanya ada satu Tuhan yang mengatur segala sesuatu dan keberhasilan suatu organisasi juga bergantung pada ketaatan dan ketaqwaan kepada-Nya.
2. Adil, yang menjunjung tinggi prinsip keadilan. Dalam setiap aspek organisasi, baik dalam hal rekrutmen, promosi, maupun hubungan dengan konsumen dan pihak lain.
3. Integritas, menerapkan standar integritas yang tinggi pada seluruh aspek organisasi, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial.
4. Berwawasan ke depan, memiliki visi dan strategi jangka panjang berdasarkan tujuan yang jelas dan terukur, serta mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan bisnis.
5. Kolaboratif, mendorong kerja sama dan kolaborasi dalam organisasi, serta menerapkan prinsip kepemimpinan yang inklusif dan menghargai perbedaan.

³⁸ Nurul Hidayat Murtafiah and Ismun Ali, "Implementasi Teori Organisasi Berbasis Nilai Spiritual Islami Dalam Praktik Pendidikan," *Journal on Education* 05 (2023): 2–3.

6. Inovatif, mengembangkan inovasi terus-menerus pada produk, layanan, dan operasional organisasi, serta mengadopsi teknologi yang memungkinkan organisasi menjadi lebih efisien dan efektif.
7. Berorientasi pada kesejahteraan, mengutamakan kesejahteraan karyawan dan konsumen, serta menerapkan praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.

Prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai spiritual dan etika dalam Islam yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya dengan cara yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang harmonis, produktif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum.³⁹

Dalam sifat organisasi keagamaan juga sering memiliki struktur hierarkis dengan pemimpin agama yang dihormati dan diikuti oleh anggotanya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas wawasan, sikap mental, dan pemahamannya pada organisasi keagamaan tersebut dengan cara mengikuti pemimpinnya. Hal tersebut juga menjadi salah satu komponen setiap individu yang berada di organisasi tersebut untuk dapat melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya guna mewujudkan kesejahteraan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya struktur yang berjenjang, setiap organisasi keagamaan dapat meningkatkan kepuasan anggota organisasinya dan menciptakan organisasi yang dapat membantu individu mengembangkan potensi dirinya serta dapat meningkatkan kualitas organisasi yang lebih baik dalam masyarakat dan bangsa.⁴⁰

Organisasi keagamaan memiliki sifat sosial dan kemanusiaan untuk komunitas mereka. Tidak heran bila setiap organisasi keagamaan memiliki sifat sosial yang ditandai dengan praktik contohnya seperti charity atau sedekah. Meskipun tradisi kemanusiaan seperti itu dapat memiliki akar budaya yang kuat dalam setiap organisasi, inspirasi kegiatan tersebut nampaknya dipandang sebagai

³⁹ Nurul Hidayati Murtafiah and Ismun Ali, "Implementasi Teori Organisasi Berbasis Nilai Spiritual Islami Dalam Praktik Pendidikan," *Journal on Education* 05 (2023): 3–4.

⁴⁰ Zidni 'Ilman Nafi'a and Abdul Muhid, "Pengaruh Komunikasi Organisasi Dan Komunikasi Antar Pribadi Terhadap Keaktifan Pengurus Gerakan Pemuda Ansor Cabang Trenggalek," 2021, 6–20.

faktor yang dominan di dalam tradisi kemanusiaan suatu organisasi keagamaan. Beberapa studi menunjukkan bahwa Hal ini disebabkan hampir semua tradisi kemanusiaan atau sifat sosial dalam suatu organisasi keagamaan selalu mengidentifikasi sebagai sebuah ajaran yang memiliki komitmen dan perhatian untuk membantu orang-orang yang lemah dan miskin sesuai dengan ketentuan agama yang ada dalam organisasi tersebut.⁴¹

Organisasi keagamaan juga sangat setia dan komitmen terhadap organisasi mereka. Sifat tersebut sangat diterapkan untuk meningkatkan kualitas organisasi keagamaan tersebut . Komitmen merupakan rasa cinta terhadap sesuatu yang dilakukan oleh individu dan komitmen dalam organisasi merupakan suatu keadaan dimana individu berpihak pada suatu organisasi dan tujuannya serta berniat untuk bertahan dalam organisasi tersebut. Hal ini terjadi pada komitmen organisasi yang didasari oleh kemauan yang kuat untuk tetap menjadi anggota organisasi tertentu, kemauan untuk berusaha keras sesuai dengan apa yang diinginkan organisasi. Dengan adanya komitmen terhadap organisasi, maka setiap individu akan mempunyai perasaan untuk tetap loyal terhadap organisasi dalam keadaan apapun.⁴²

Bashaw (2008:156) menyatakan bahwa komitmen organisasi mempunyai indikator sebagai berikut:

1. keinginan
2. Loyalitas
3. Kebanggaan

Dengan demikian, indikator komitmen seseorang menjadi titik tolak untuk melihat sejauh mana komitmen individu atau kelompok tersebut dalam suatu organisasi keagamaan agar dapat meningkatkan organisasi tersebut.⁴³

⁴¹ Hilman Latief, "Agama Dan Pelayanan Sosial: Interpretasi Dan Aksi Filantropi Dalam Tradisi Muslim Dan Kristen Di Indonesia" IX (2013): 179–80.

⁴² Ali Imron Maulana Maulana, Budi Wahono, and Khalikussabir, "Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Komunikasi Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pengurus," 2019, 156–57.

⁴³ Ali Imron Maulana Maulana, Budi Wahono, and Khalikussabir, "Maulana, Ali Imron Maulana Wahono, Budi Khalikussabir," 2019, 157.

Organisasi keagamaan sering memiliki ritual dan upacara yang menjadi bagian sifat yang penting dalam praktek keagamaan mereka. Ritual dan upacara mempunyai arti yang berbeda. Ritual adalah hal-hal yang dilakukan dalam rangka menyelenggarakan suatu upacara. Pada dasarnya ritual adalah suatu hal yang dilakukan secara berulang-ulang sebagai suatu kebiasaan. Manusia dalam kesehariannya juga melakukan ritual, setelah bangun tidur di pagi hari, sebelum makan, saat berangkat kerja, ataupun sebelum tidur, bahkan banyak orang yang mempunyai persiapan tersendiri untuk melakukan sesuatu yang rutin, hal inilah yang disebut dengan ritual.

Dalam organisasi keagamaan, upacara dan ritual keagamaan dilaksanakan untuk mempersiapkan kegiatan yang akan berlangsung. Ritual dan upacara ini dimaksudkan untuk meminta izin kepada penguasa yang berkuasa untuk melakukan setiap aktivitas. Dengan adanya ritual dan upacara dalam suatu organisasi keagamaan maka hubungan manusia dengan kekuatan yang lebih besar akan menjadi semakin erat, organisasi tersebut juga membentuk manusia menjadi lebih kuat dan berhati-hati atau bijaksana serta manusia akan sadar dalam segala hal yang dilakukannya dalam organisasi tersebut.⁴⁴

Organisasi keagamaan biasanya terlibat dalam pendidikan agama dan penyebaran ajaran agama kepada anggota dan masyarakat luas. Banyak organisasi keagamaan yang terlibat dalam pendidikan, baik melalui sekolah, seminar, atau program pendidikan agama bagi semua usia. Seperti halnya dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 menyebutkan bahwa: “pendidikan nasional berfungsi menumbuhkembangkan dan membentuk sebagaimana diatur dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 3 menyatakan bahwa: “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada

⁴⁴ Patricia Jessy Angelina and Laksmi K. Wardani, “Makna Ruang Ritual Dan Upacara Pada Interior Keraton Surakarta,” *Jurnal Intra* 02 (2014): 296.

Tuhan Yang Maha Esa. Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri serta menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, pendidikan dalam organisasi keagamaan ini berkaitan dengan pembinaan yang kemudian dapat mendasari perilaku manusia dalam berbagai bidang kehidupan. Pendidikan pada organisasi keagamaan seperti ini juga memberikan peningkatan potensi spiritual dan pada akhirnya bertujuan untuk mengoptimalkan berbagai potensi yang dimiliki manusia, yang aktualisasinya mencerminkan kehormatan dan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang dituangkan dalam organisasi keagamaan serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pendidikan dalam organisasi keagamaan seperti ini memberikan peningkatan potensi spiritual juga dan pada akhirnya bertujuan untuk optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang dituangkan dalam organisasi keagamaan itu.⁴⁵

2.1.2 Jenis-jenis Organisasi Keagamaan Islam

Organisasi keagamaan adalah kelompok atau badan yang fokus pada aspek spiritual dan keagamaan. Organisasi keagamaan juga penting dalam kehidupan manusia. Organisasi keagamaan dicirikan sebagai sistem sosial yang ada dalam lingkungan yang kompleks dan terus berubah. Organisasi keagamaan seperti jamaah mempunyai tujuan keagamaan, misalnya ibadah. Sebagai informasi lebih lanjut, organisasi keagamaan bergantung pada otoritas di luar kendali mereka. mereka mempunyai kendali yang relatif kecil dalam menentukan tujuan mereka

⁴⁵ Abu Rokhmad Rokhmad, "Buku Dan Penyebaran Ideologi Radikal Di Lembaga Pendidikan," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20 (2018): 51.

sendiri. Dalam konteks Islam, organisasi mencerminkan nilai-nilai agama, prinsip etika, dan tata kelola yang diterapkan dalam organisasi keagamaan. Berikut beberapa contoh organisasi Islam yang paling menonjol di masyarakat, yaitu:⁴⁶

1. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) didirikan pada tanggal 26 Juli 1975 atas prakarsa pemerintah dengan tujuan untuk menegakkan dan mengendalikan ekspresi masyarakat Islam atas bantuan negara (dalam hal ini Kementerian Agama)² serta sebagai saluran alternatif bagi lembaga-lembaga keagamaan. pemerintah untuk berkomunikasi dengan komunitas Muslim. Berdirinya MUI merupakan hasil pertemuan atau musyawarah para ulama, intelektual dan zu'ama. Kesepuluh ulama pionir pendiri tersebut berasal dari unsur ormas Islam tingkat pusat yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, Perti, al-Washliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, DMI dan al-Ittihadiyyah, ditambah 4 orang ulama dari kalangan Rohaniwan Islam TNI/POLRI serta 13 tokoh atau intelektual sebagai perwakilan perseorangan. Dari musyawarah tersebut lahirlah piagam berdirinya MUI yang ditandatangani oleh seluruh peserta musyawarah yang kemudian disebut Musyawarah Ulama Nasional (Munas). MUI adalah suatu lembaga yang menurut pedoman pokoknya antara lain berfungsi memberikan fatwa dan nasihat mengenai masalah-masalah keagamaan dan sosial kepada pemerintah dan umat Islam pada umumnya, sebagai aturan baik dan buruk dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional. . Organisasi MUI merupakan produk struktur kehidupan masyarakat Indonesia pada masa Orde Baru yang menjadi wadah untuk menjembatani aspirasi umat Islam dengan pemerintah.⁴⁷

Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan penting dalam kehidupan keagamaan dan sosial di Indonesia. MUI memiliki berbagai fungsi dan peran yang mencerminkan sifat sosial dan kemanusiaan dalam kerangka keagamaan Islam

⁴⁶ Putri et al., "Pengaruh Nilai Nilai Agama Islam Dalam Membentuk Strategi Komunikasi Organisasi Keagamaan."

⁴⁷ Khozainul Ulum Ulum, "Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia," *AKADEMIKA*, 08 (2014): 167.

dengan tujuan untuk menjadi wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan Muslim Indonesia dalam memberikan fatwa, bimbingan, dan nasihat kepada umat Islam. Fungsi dan Tugas Utama MUI yaitu:

1. Fatwa. Salah satu peran utama MUI adalah mengeluarkan fatwa tentang berbagai masalah keagamaan, yang menjadi panduan bagi umat Islam dalam menjalankan ajaran agama mereka. Fatwa ini mencakup berbagai isu, mulai dari ibadah hingga masalah sosial, ekonomi, dan politik.
2. Pembinaan Umat. MUI aktif dalam memberikan pembinaan kepada umat Islam melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan dakwah. Mereka bekerja untuk meningkatkan pemahaman dan pengamalan ajaran Islam di kalangan masyarakat.
3. Kerjasama Antar Umat Beragama. MUI juga berperan dalam memfasilitasi dialog dan kerjasama antar umat beragama di Indonesia. Mereka berusaha untuk menciptakan keharmonisan dan toleransi antar komunitas agama.
4. Pengawasan Produk Halal. MUI memiliki peran penting dalam sertifikasi halal di Indonesia. Mereka memastikan bahwa produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik yang beredar di pasar sesuai dengan syariat Islam.
5. Advokasi dan Sosial. MUI sering terlibat dalam advokasi sosial, baik dalam hal pembelaan hak-hak umat Islam maupun dalam kegiatan kemanusiaan. Mereka turut serta dalam membantu korban bencana alam, kemiskinan, dan masalah sosial lainnya.
6. Fatwa tentang Isu-Isu Kontemporer. MUI terus memberikan panduan terkait isu-isu kontemporer seperti teknologi, kesehatan, ekonomi digital, dan lainnya, untuk memastikan bahwa umat Islam dapat menavigasi tantangan zaman modern sesuai dengan ajaran agama.

MUI terdiri dari beberapa komisi yang masing-masing memiliki tugas spesifik, seperti Komisi Fatwa, Komisi Dakwah, Komisi Pendidikan, dan Komisi Ekonomi Syariah. Organisasi ini juga memiliki perwakilan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia.

MUI sering menyelenggarakan seminar, lokakarya, dan konferensi yang berkaitan dengan isu-isu keagamaan dan sosial. Mereka juga terlibat dalam program pemberdayaan ekonomi umat, seperti mendukung perkembangan ekonomi syariah dan usaha mikro kecil menengah (UMKM). MUI juga memainkan peran yang signifikan dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, memberikan panduan moral dan spiritual serta berkontribusi dalam pembangunan sosial dan kemanusiaan.

2. Nahdlatul Ulama (NU)

Nahdlatul Ulama (NU) didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 bertepatan dengan 16 Rajab 1334 H di Surabaya oleh K.H. Hasyim Asy'ari bersama tokoh ulama tradisional dan pengusaha di Jawa Timur. Berdirinya NU diawali dengan lahirnya Nahdlatut-tujjar (1918) yang muncul sebagai lembaga gerakan ekonomi pedesaan, disusul dengan munculnya Taswirul Afkar (1922) sebagai gerakan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, dan Nahdlatul Watan (1924) sebagai gerakan politik di bidang politik. bentuk pendidikan.⁵ Dengan demikian ditemukan tiga pilar penting bagi NU, yaitu: (1) Wawasan Ekonomi Umat, (2) Wawasan Keilmuan, Sosial dan Budaya, dan (3) Wawasan Kebangsaan. Setelah NU resmi berdiri sebagai jam'iyah pada tahun 1926, banyak pula madrasah yang didirikan berdampingan dengan pesantren yang telah lama ada dan mengakar di Indonesia. Organisasi Nahdlatul Ulama (NU) merupakan mitra sejajar pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional yang mempunyai peluang yang sangat luas untuk turut serta mewujudkan tujuan organisasi dan pendidikan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional. Penanggung jawab penyelenggaraan pendidikan di lingkungan NU harus mempunyai komitmen dalam menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, yang selalu mendapat dukungan dari masyarakat dan pemerintah.⁴⁸

⁴⁸ Ali Rahim, "Peranan Dan Sistem Pendidikannya," *Jurnal Al Hikmah* XIV (2013): 174–85.

Perkembangan Nahdlatul Ulama (NU) di Indonesia mencerminkan dinamika dan kontribusi NU sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berperan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Perkembangan NU juga mulai terlihat seiring dengan penyebaran pesantren-pesantren dan kegiatan keagamaan yang berafiliasi dengan NU seperti:

1. Pendidikan. NU di Indonesia mendirikan banyak lembaga pendidikan, mulai dari madrasah hingga perguruan tinggi. Lembaga-lembaga ini tidak hanya fokus pada pendidikan agama, tetapi juga pendidikan umum dengan basis nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah.
2. Pesantren. Pesantren-pesantren yang berafiliasi dengan NU, seperti Pesantren Cipasung, Pesantren Al-Muhajirin, dan lainnya, memainkan peran penting dalam pendidikan agama dan pengembangan karakter santri di Indonesia. Pesantren-pesantren ini menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial yang signifikan.
3. Organisasi Kepemudaan dan Wanita. NU di Indonesia juga aktif melalui badan otonomnya seperti Ansor (Gerakan Pemuda Ansor), Fatayat NU, dan IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama). Organisasi-organisasi ini berperan dalam pembinaan generasi muda dan perempuan, serta aktif dalam kegiatan sosial dan kemasyarakatan.
4. Kegiatan Sosial dan Keagamaan*: NU di Kota Bandung sering mengadakan berbagai kegiatan keagamaan seperti pengajian, tahlil, istighotsah, serta peringatan hari-hari besar Islam. Selain itu, mereka juga aktif dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial, pemberdayaan ekonomi umat, dan bantuan kemanusiaan.
5. Pengaruh Politik. Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar, NU juga memiliki pengaruh dalam ranah politik lokal. Banyak kader NU yang aktif dalam pemerintahan daerah, serta berperan dalam membentuk kebijakan yang berpihak pada kepentingan umat Islam dan masyarakat secara umum.
6. Kolaborasi dan Modernisasi. NU di Indonesia juga beradaptasi dengan perkembangan zaman melalui berbagai kolaborasi dengan lembaga lain, baik

pemerintah maupun swasta, serta dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk dakwah dan pendidikan.

Perkembangan NU di Indonesia menunjukkan bagaimana organisasi ini terus beradaptasi dan berkembang dalam menjawab tantangan zaman, sembari tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional Islam yang menjadi dasar perjuangannya.

3. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah sebuah organisasi Islam besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW, sehingga Muhammadiyah juga bisa dikenal sebagai orang-orang pengikut Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah artinya pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan utama Muhammadiyah adalah memulihkan segala penyimpangan yang terjadi dalam proses dakwah. Penyimpangan ini seringkali menyebabkan ajaran Islam tercampur dengan adat istiadat di daerah tertentu karena alasan adaptasi. Gerakan Muhammadiyah bercirikan semangat membangun tatanan sosial dan pendidikan menuju masyarakat yang lebih maju dan terpelajar. Menunjukkan bahwa ajaran Islam bukan sekadar agama yang bersifat personal dan statis, melainkan bersifat dinamis dan eksis sebagai suatu sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Muhammad Darwis atau lebih dikenal dengan K.H. Ahmad Dahlan adalah pendiri Muhammadiyah pada tanggal 8 Dzulhijah 1330 H, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912, di desa Kauman, Yogyakarta. Pada tahun itu, K.H. Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah untuk menjalankan cita-cita reformasi Islam di Indonesia. K.H.Ahmad Dahlan ingin mewujudkan pembaharuan cara berpikir dan beramal sesuai tuntunan agama Islam. K.H.Ahmad Dahlan ingin mengajak umat Islam di Indonesia untuk kembali hidup sesuai tuntunan Al-Qur'an dan Al-Hadist.⁴⁹

Sejak pertama kali didirikan, ditegaskan bahwa Muhammadiyah bukanlah organisasi yang bergerak di bidang politik, melainkan bersifat sosial dan bergerak

⁴⁹ Cucu Suryani, "Sejarah Muhammadiyah," 2022, 1–2.

di bidang pendidikan. Hasil pemikiran K.H.Ahmad Dahlan yang dilakukan secara mendalam dan sungguh-sungguh kemudian melahirkan berbagai gerakan reformasi yang merupakan operasionalisasi dan implementasi dari hasil pemahaman dan pemikirannya mengenai ajaran Islam. Di Indonesia lahir beberapa organisasi atau gerakan Islam, diantaranya adalah Muhammadiyah yang didirikan bersamaan dengan bangkitnya masyarakat Islam Indonesia dan merupakan organisasi sosial keagamaan terbesar di Indonesia, serta organisasi lain yang bergerak di bidang politik, sosial, dan pendidikan. bidang.⁵⁰

4. Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII)

Organisasi LDII pertama kali didirikan pada tanggal 3 Januari 1972 dengan nama Yayasan Lembaga Pegawai Islam (YAKARI). Pada Musyawarah Umum (Mubes) tahun 1981 namanya diubah menjadi Lembaga Pegawai Indonesia (LEMKARI), dan pada Mubes tahun 1990 sesuai dengan arahan Jenderal Rudini sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri) saat itu, nama LEMKARI yang sama dengan akronim Institut Karate-Do Indonesia, diubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Namun dari nama aslinya ada yang mengatakan bahwa sejarah LDII awalnya Darul Hadits, kemudian berubah menjadi Lembaga Dakwah Islam Indonesia, yaitu sebuah organisasi kemasyarakatan resmi dan sah yang mengikuti ketentuan UU No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan, dan pelaksanaannya meliputi Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 1986. LDII memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART), program kerja dan pengurus dari tingkat pusat hingga desa (kelurahan).⁵¹

Keberadaan LDII telah terdaftar di Badan Persatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang dan Linmas) Departemen Dalam Negeri. LDII bergerak dalam bidang keagamaan dan sosial (Islam) dengan kantor pusat di Jl Arteri Mahasiswa Tentara no. 28 Patal, Senayan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Organisasi ini mempunyai jumlah anggota sebanyak 15 juta orang (tahun 2005) dengan ketua

⁵⁰ Cucu Suryani, "Sejarah Muhammadiyah," 2022, 2.

⁵¹ Novi Maria Ulfah, "Strategi Dan Manajemen Dakwah Lembaga Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang," *Jurnal Ilmu Dakwah* 35 (2015): 211.

umum Prof. Dr. Ir. K.H. Abdullah Syam, M.Si. Sesuai dengan Pasal 6 Anggaran Dasar, LDII bertujuan untuk meningkatkan mutu peradaban, kehidupan, kehormatan dan harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta ikut serta dalam pembangunan manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan iman. dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mewujudkan masyarakat yang beradab. demokrasi dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila yang diridhoi Allah SWT.⁵²

5. Persatuan Islam (Persis)

Persatuan Islam (PERSIS) adalah nama Jam'iyah yang digunakan untuk mengarahkan semangat jihad, ijtihad dan tajdid guna mencapai visi dan misi Jam'iyah yang menjadi landasan filosofis Jam'iyah yaitu kesatuan usaha Islam dan kesatuan perasaan Islami. Justru lahir sebagai jawaban terhadap tantangan kondisi umat Islam yang sedang tenggelam dalam stagnasi (tak menentu), terperosok dalam kehidupan tasawuf, tumbuhnya khurafat, bid'ah, tahayul dan musyrik, serta umat Islam yang terbelenggu oleh Belanda. penjajah kolonial yang berusaha memadamkan cahaya Islam. Ikatan Islam didirikan oleh K.H Zamzam di Bandung pada tanggal 12 September 1923. Perjalanan panjang suatu organisasi dari awal berdirinya hingga eksistensinya saat ini tidak lepas dari dinamika sosial budaya dalam situasi dan kondisi masyarakat serta perilaku politik di mana organisasi tersebut tumbuh. dan berkembang. Begitu pula dengan Jami'iyah Persis periode pertama yang dipimpin oleh Muhammad Zamzam, Muhammad Yunus, Ahmad Hasan dan Muhammad Nasir, yang hidup pada masa penjajahan Belanda menghadapi tantangan berat dalam menyebarkan gagasan dan pemikirannya. Namun mereka tetap berjuang untuk menggaungkan ideologi kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah (Ar-Ruju'ila AlQur'an Wa As-Sunnah) yang dengan sendirinya melakukan jihad untuk memberantas khurafat, bid'ah, tahayul dan syirik, serta seperti menghalangi fatwa. -Fatwa yang menyesatkan. Sejak saat itulah timbul perdebatan dengan para "ulama tradisional", terutama perdebatan mengenai

⁵² Novi Maria Ulfah, "Strategi Dan Manajemen Dakwah Lembaga Islam Indonesia (LDII) Kecamatan Tugu Kota Semarang," *Jurnal Ilmu Dakwah* 35 (2015): 210–11.

masalah ta'abudi seperti ushalli, talqin, tahlil, dan berbagai masalah agama lainnya.⁵³

Selain itu para tokoh ulama Persis lainnya adalah A. Hasan, H. Muhammad Yunus, K.H. Ma'shum, K.H. Munawar Chalili, K.H. Imam Ghazali, K.H. M. Isa Anshari, Fakhruin Al-Kahiri, K.H. E. Abdurrahman dan A. Qadir Hasan. Persis menitikberatkan pemberantasan bid'ah, khurafat, takhayul, taklid dan syirik dikalangan umat Islam. Disamping itu organisasi ini juga berupaya memperluas tablig dan da'wah melalui pendidikan dan penerbitan.⁵⁴

6. Persatuan Umat Islam (PUI)

Kabupaten di wilayah timur dan barat Jawa Barat menjadi cikal bakal lahirnya dua tokoh pendiri PUI, yaitu: Abdul Halim dan Ahmad Sanusi. Majalengka menjadi pusat kegiatan dakwah Abdul Halim dengan pertama kali mendirikan organisasi Madjlisoel 'Ilmi pada tahun 1911, sedangkan Sukabumi merupakan tempat pertama kali Ahmad Sanusi berkiprah dengan mendirikan Pondok Pesantren Syamsul Ulum di kawasan Gunung Puyuh Sukabumi. Abdul Halim dan Ahmad Sanusi merupakan tokoh pergerakan nasional yang terlibat dalam upaya kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda dan Jepang pada masa penjajahan. Keduanya merupakan anggota BPUPKI. Karena kedekatannya di bidang pergerakan nasional, menurut Oop Sofiah, keduanya sepakat untuk bersama-sama mendirikan PUI dengan menggabungkan dua organisasi yang dipimpinnya masing-masing. Organisasi yang didirikan oleh Ahmad Sanusi ini pernah berganti nama, dimulai dengan nama Al-Ittihadul Islamiyah (AII) pada tahun 1931, kemudian berubah nama menjadi Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII) pada masa pendudukan Jepang pada tahun 1944. Pada akhirnya, nasib pun berubah. antara Abdul Halim dan Ahmad Sanusi membuat mereka bertekad untuk berjuang bersama dalam satu payung organisasi.

⁵³ Surya Darma, "Sejarah Pemikiran Dan Fenomena Ormas Persatuan Islam Dalam Dakwah Islamiyah" 3 (2032): 34–35.

⁵⁴ Darma.

Akhirnya pada tahun 1952, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 5 April, organisasi yang dipimpinnya menjadi Persatuan Umat Islam (PUI) hingga sekarang.⁵⁵

2. 2 Kesetaraan Gender

1. Definisi gender

Istilah gender diciptakan oleh para ilmuwan sosial untuk menggambarkan bentuk budaya yang dipelajari dan disosialisasikan sejak lahir, serta perbedaan inheren antara laki-laki dan perempuan, yang diciptakan oleh Tuhan. Perbedaan ini penting karena hingga saat ini, masyarakat sering bingung membedakan gender serta ciri-ciri alami dan non-alami lainnya. Demi terciptanya gambaran relasi gender yang dinamis, akurat, dan sesuai dengan realitas yang ada di masyarakat, perbedaan peran gender tersebut sesungguhnya memungkinkan kita untuk mempertimbangkan kembali pembagian peran yang selama ini diasumsikan melekat pada perempuan dan laki-laki. . Beragamnya konsepsi sosial mengenai gender telah mengakibatkan kesenjangan antara peran sosial antara laki-laki dan perempuan.⁵⁶

Peran, tindakan, karakteristik, dan perilaku yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan dalam suatu budaya secara kolektif disebut sebagai gender, yang merupakan konstruksi sosial. Dengan kata lain, gender mengacu pada perbedaan tugas, tanggung jawab, dan fungsi antara laki-laki dan perempuan yang dibentuk oleh faktor sosial dan budaya, bukan hanya perbedaan biologis. Gender secara umum menyebabkan terjadinya variasi peran, tugas, fungsi, bahkan bidang tempat seseorang melakukan aktivitasnya. Mirip dengan sifat biologis laki-laki dan perempuan yang bersifat konstan dan abadi, kesenjangan gender begitu tertanam dalam perspektif kita sehingga kita sering melupakannya.⁵⁷

⁵⁵ Wildan Imaduddin Muhammad, "Ormas Islam Di Jawa Barat Dan Pergerakannya" XVI (2016): 88–90.

⁵⁶ Herien Puspitawati, "KONSEP , TEORI DAN ANALISIS GENDER Oleh : Herien Puspitawati Departemen Ilmu Keluarga Dan Konsumen Fakultas Ekologi Manusia- Institut Pertanian Bogor Indonesia . PT IPB Press . Bogor ." 4 (2013): 1–13.

⁵⁷ Syaefudin Achmad, "Membangun Pendidikan Berwawasan Gender S y Aefudin Achmad IAIN Salatiga Email: S," 2019, 70–91, <https://doi.org/10.24090/yinyang.v14i1.2019.pp70-91>.

Gender dapat diartikan dengan pembedaan tugas, tanggung jawab, status, dan fungsi yang dimiliki laki-laki dan perempuan sebagai hasil formasi (konstruksi) sosial budaya yang tertanam dalam diri mereka melalui sosialisasi generasi. Jadi, gender adalah hasil kesepakatan yang dibuat-buat di antara manusia. Akibatnya, gender berbeda dari satu tempat ke tempat lain dan dari waktu ke waktu. Gender bukanlah bawaan; hal itu dapat diubah dan dipindahkan dari satu orang ke orang lain berdasarkan keadaan dan norma budaya saat itu.⁵⁸

Definisi gender sebagai berikut:

1. Gender mengacu pada peran, sikap, aktivitas, dan kualitas yang diciptakan secara sosial yang dianggap pantas bagi laki-laki dan perempuan oleh masyarakat tertentu, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
2. Dalam konteks sosial dan budaya tertentu, gender mengacu pada peran, aktivitas, tanggung jawab, dan persyaratan yang terkait dengan laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini menurut Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (UNOCHA).

Konsep gender, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, mengacu pada peran dan tugas yang dimiliki laki-laki dan perempuan, yang ditentukan dan dapat berubah tergantung pada konteks sosial dan budaya masyarakat. Gender dan seks biologis pada umumnya bukanlah hal yang sama. Aspek sosial, budaya, psikologis, dan perilaku dari pembedaan antara laki-laki dan perempuan dalam suatu komunitas lebih erat kaitannya dengan gender.⁵⁹

Dalam buku *SEX DAN GENDER* Judith Butler secara umum melihat gender sebagai ciptaan sosial yang performatif dan diskursif yang mudah ditempa untuk melanggar konvensi yang sudah ada. Pendekatannya mempertanyakan konsepsi gender esensialis dan mendorong analisis kritis terhadap konstruksi sosial dan pemeliharaan gender. Butler berpendapat bahwa gender adalah sebuah konstruksi yang terus-menerus ditampilkan melalui perilaku, pola bicara, cara berpakaian, dan

⁵⁸ Achmad.

⁵⁹ Marcelinus Molo, "SEX DAN GENDER" 4, no. 2 (1993): 85–93.

tingkah laku seseorang, bukan apa pun yang bersifat fundamental atau intrinsik. Butler menegaskan bahwa proses gender merupakan salah satu kutipan, di mana orang meniru atau mengutip perilaku dan atribut fisik yang terkait dengan maskulinitas atau feminitas dalam keadaan sosial tertentu. Hal ini menantang anggapan bahwa orientasi seksual heteroseksual dan jenis kelamin biologis harus sejalan dengan gender. Ia menegaskan bahwa ada identitas dan ekspresi gender lain yang bertentangan dengan ekspektasi tersebut.⁶⁰

Wilujeng Asih Purwani, dalam bukunya “PERFORMATIVITAS GENDER DALAM NOVEL THE FEMALE MAN KARYA JOANNA RUSS” Pendekatan Judith Butler sebagai ahli teori feminis berpusat pada pemeriksaan menyeluruh terhadap asal usul subjek, karena teori feminis hanya merekonstruksi subjektivitas subjek feminisme. Dia sangat dihormati di komunitas akademis modern sebagai pemikir brilian. Judith Butler menjawab berbagai tantangan dalam bukunya, memperkuat subversi teori performativitas gender dan menyempurnakan teorinya sendiri. Dia memperbarui teorinya bersamaan dengan proses penulisannya yang sedang berlangsung. Pikirannya pasti akan terus memiliki keindahan abadi. Dalam bidang studinya, penelitian dan kritik tambahan menjadi semakin penting dan penting.⁶¹

Wilujeng Asih Purwani, dalam bukunya “PERFORMATIVITAS GENDER DALAM NOVEL THE FEMALE MAN KARYA JOANNA RUSS” Judith Butler, gender bukanlah kualitas intrinsik seseorang; sebaliknya, hal itu diciptakan oleh masyarakat. Judith Butler telah mendedikasikan dirinya untuk mempertimbangkan kembali hubungan antara gender sosial dan jenis kelamin. Jelaslah bahwa Butler mendasarkan karyanya pada analisis gender Beauvoir. Korpus penelitian mengenai studi gender diabaikan di masa lalu. Namun, Butler percaya bahwa subjek dan tubuh menyiratkan hak pilihan, kematian, dan kerentanan. Keberadaan fisiknya menjadikan hubungannya dengan masyarakat lebih jelas bagi kita. Di sini, istilah "melakukan" dan "dilakukan" menjadi tidak jelas. Topiknya selalu memuat komponen publik, dan dalam ranah publik, gender dimaknai sebagai sebuah

⁶⁰ Moh. Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature Dan Nurture" 11, no. 1 (n.d.).

⁶¹ Wilujeng Asih Purwani, "PERFORMATIVITAS GENDER DALAM NOVEL THE FEMALE MAN KARYA JOANNA RUSS" 01, no. 02 (2019): 110–15.

fenomena sosial. Performativitas gender telah menjadi topik diskusi yang kontroversial karena buku *Gender Trouble*.⁶²

2. Karakteristik gender

Gender dan jenis kelamin mempunyai arti yang berbeda. Gender adalah identitas, seks mengacu pada ciri-ciri biologis. Kualitas laki-laki dan perempuan yang dibangun secara sosial disebut sebagai gender. Peran, adat istiadat, dan perilaku yang muncul saat menjadi laki-laki atau perempuan semuanya merupakan bagian dari gender. Gender tidak sama dengan jenis kelamin. Ciri-ciri biologis dan fisiologis seseorang, termasuk kromosom, kadar hormon, dan organ reproduksinya, disebut sebagai jenis kelamin. Misalnya, keberadaan rahim menunjukkan jenis kelamin perempuan. Namun, seorang perempuan tidak selalu mengidentifikasi dirinya sebagai perempuan dalam konteks studi gender.⁶³

Identitas gender seseorang dibentuk oleh masyarakat. Pengalaman seseorang mengenai gender disebut sebagai identitas gendernya. Jenis kelamin seseorang dapat berubah kapan saja. Berikut adalah ringkasan beberapa dari banyak kata yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis identifikasi gender yang diambil dari *Women's Health*.⁶⁴

1. Cisgender

Istilah cisgender menggambarkan seseorang yang identitas gendernya sesuai atau cocok dengan jenis kelamin yang ditetapkan untuknya saat lahir. Misalnya, jenis kelamin berdasarkan alat kelaminnya adalah laki-laki, kemudian identitas gender orang itu selaras dengan jenis kelaminnya, maka artinya dia cisgender. Terkadang istilah ini disingkat menjadi “Cis”. Cisgender berasal dari wacana aktivis trans pada tahun 1990-an yang mempertanyakan berbagai representasi populer tentang seks dan gender. Jika tidak diberi tanda, label laki-laki dan perempuan cenderung menormalisasi sifat cis. Oleh karena itu, istilah “translaki-

⁶² Wilujeng Asih Purwani, “PERFORMATIVITAS GENDER DALAM NOVEL THE FEMALE MAN KARYA JOANNA RUSS” 01, no. 02 (2019): 110–15.

⁶³ Santy, “Identitas Gender Dan Seksualitas Melalui Performativitas: Menyambut Keragaman Identitas Gender,” n.d.

⁶⁴ Dra. Vina Salviana Salviana, “Pengertian Gender Dan Sosialisasi Gender,” 1955, 1–32.

laki” dan “transwanita”, serta identifikasi “cis laki-laki” dan “cis perempuan”, digunakan untuk menolak pelestarian norma dan marginalisasi kaum trans yang disebabkan oleh norma-norma tersebut. Selain itu, meskipun “nontransgender” sama dengan “cisgender”, istilah ini menuai kritik karena mencirikan identitas dengan cara yang kurang positif dibandingkan “transgender”. Salah satu cara untuk mengidentifikasi secara positif sebagai non-trans adalah dengan menjadi cisgender.⁶⁵

2. Transgender

Transgender adalah orang yang identitas gendernya tidak sesuai dengan jenis kelaminnya saat lahir. Mereka bisa transgender pria, transgender wanita, dan juga non-biner, artinya mereka tidak mengidentifikasi diri sebagai pria atau wanita. Mereka yang mengidentifikasi diri sebagai transgender biasanya mengartikan bahwa mereka adalah "kebalikan" dari jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir, baik laki-laki atau perempuan. Misalnya, seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan setelah awalnya dilahirkan sebagai laki-laki sering disebut sebagai "perempuan transgender" atau "perempuan transgender". Sebaliknya, "pria transgender" atau "transman" adalah seseorang yang mengidentifikasi dirinya sebagai laki-laki tetapi terlahir sebagai perempuan.⁶⁶

Meskipun beberapa transgender yakin bahwa mereka terjebak dalam "tubuh yang salah", sebagian lainnya percaya bahwa identifikasi gender mereka lebih fleksibel. Mereka dapat mengidentifikasi dirinya sebagai non-biner dan juga transgender. Orang yang mengidentifikasi diri sebagai laki-laki atau perempuan, yang merupakan “kebalikan” dari jenis kelamin mereka saat lahir, umumnya disebut sebagai transgender. Misalnya, seseorang yang mengidentifikasi diri sebagai perempuan setelah awalnya dilahirkan sebagai laki-laki sering disebut sebagai "perempuan transgender" atau "perempuan transgender". Sebaliknya, "pria transgender" atau "transman" adalah seseorang yang mengidentifikasi dirinya

⁶⁵ Muhammad Yogie Ernanda, “Feminisme Dalam Konteks Etika Kritik Dan Refleksi Terhadap Pemahaman Tradisional,” n.d., 1–9.

⁶⁶ Dinda Putri et al., “PERAN GENDER DALAM DINAMIKA PERUBAHAN : PERSPEKTIF MAHASISWA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF” 2 (2024): 216–20.

sebagai laki-laki tetapi terlahir sebagai perempuan. Dan ada beberapa transgender yakin bahwa mereka terjebak dalam "tubuh yang salah", sebagian lainnya percaya bahwa identifikasi gender mereka lebih fleksibel. Mereka dapat mengidentifikasi dirinya sebagai non-biner dan juga transgender.⁶⁷

3. Non-biner

Non-biner adalah seseorang yang tidak mengidentifikasi secara jelas atau eksklusif dirinya laki-laki atau perempuan. Mereka bisa merasakan kedua karakteristik gender tersebut atau merasa berbeda dari keduanya. Beberapa orang non-biner yang hidup di antara dua kategori gender biner, mereka yang merasa berada di luar kategori-kategori ini, dan orang-orang yang sepenuhnya menolak gagasan biner tentang gender dan melihatnya sebagai sesuatu yang bisa 'didorong maju mundur'.⁶⁸

Orang yang mengidentifikasi diri sebagai non-biner mungkin bereksperimen dan mengeksplorasi gender mereka dengan cara yang fleksibel sepanjang hidup mereka. Namun, hal ini juga dapat memberi mereka jalan tengah antara dua peran gender konvensional.⁶⁹

Gagasan tentang identitas gender non-biner atau genderqueer lebih asing dibandingkan identitas transgender. Oleh karena itu, individu biner mungkin menghadapi kesulitan lebih lanjut dalam mendapatkan pengakuan resmi identitas mereka jika mereka memilih untuk tidak mengubah cara mereka menampilkan diri dalam hal kesehatan, hukum, atau masyarakat.⁷⁰

4. Interseks

Interseks adalah seseorang yang lahir dengan kombinasi karakteristik jenis kelamin secara biologis (organ genital, hormon, kromosom) atau variasi genital

⁶⁷ Dhea Januastasya Audina, "Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia" 2, no. 4 (2022): 148–54.

⁶⁸ Audina.

⁶⁹ Syayidah Fitria and Lulu Aniqurrohmah, "Kesetaraan Gender Dan Nilai Nilai Yang Terkandung Di Dalamnya Menurut Hak Asasi Manusia Jurnal Dunia Ilmu Hukum" 1 (2023): 50–56.

⁷⁰ Joan Meta et al., "Dampak Perilaku Sosial Mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Kesetaraan Gender" 7, no. 4 (2022): 1124–28.

tertentu yang tidak selaras dengan salah satu jenis kelamin biologis. Interseks adalah variasi alami dalam anatomi manusia, dan tidak boleh dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Planned Parenthood memperkirakan bahwa 1-2 dari 100 orang di AS adalah interseks.⁷¹

Ilmu kedokteran dapat menentukan jenis kelamin seseorang interseks dengan membandingkan komponen internal dan eksternalnya. Misalnya, jika gender bagian luarnya adalah laki-laki dan mempunyai penis atau keduanya (penis dan nana), maka gender bagian dalam adalah feminin. Memiliki alat kelamin laki-laki bagian dalam tetapi vagina bagian luar, atau sebaliknya, juga dimungkinkan. Beberapa orang bahkan tidak memiliki alat kelamin sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang mungkin berpenampilan laki-laki tetapi tidak memiliki penis, atau mungkin berpenampilan perempuan tetapi hanya memiliki lubang kencing.⁷²

5. Gender Fluid

Gender fluid mengacu pada seseorang yang lebih suka mengekspresikan salah satu dari maskulinitas atau feminitasnya. Identitas gender mereka bervariasi, mungkin dari hari ke hari. Seseorang yang teridentifikasi sebagai orang yang memiliki gender yang fleksibel dapat beradaptasi dengan identitas gendernya. Mereka dapat mengidentifikasi diri sebagai satu gender, beberapa gender, atau tidak sama sekali. Identifikasi atau ekspresi gender mereka bersifat fleksibel. Seiring waktu, identitas dan ekspresi gender mereka juga bisa berubah.⁷³

Ekspresi gender adalah penampilan lahiriah seseorang, sedangkan identitas gender adalah identifikasi gender yang dirasakan seseorang. Cara seseorang mengekspresikan identifikasi gendernya disebut ekspresi gender. Individu dapat memilih untuk mengekspresikan gender mereka dengan cara yang maskulin atau

⁷¹ Muhamad Zainul Abidin, "KESETARAAN GENDER DALAM BINGKAI WASATHIYAH ISLAM DARI PERSPEKTIF AI-QUR'AN Muhamad," n.d., 46–68.

⁷² Defyanti Khairunnisak et al., "Kompleksitas Kesetaraan Gender Di Indonesia Menuju Era" 2, no. 4 (2023): 480–86, <https://doi.org/10.55123/sosmaniora.v2i4.2704>.

⁷³ Dinda Ayu Wardhani, "PERAN PEMBENTUKAN KOMITE SOSIAL KESETARAAN GENDER PEREMPUAN DALAM ISU STEREOTIP" 3, no. 7 (2022): 785–98.

feminin, atau tidak keduanya. Berbeda dengan seks, yang diartikan sebagai alat kelamin bawaan seseorang, gender itu berbeda.⁷⁴

Menurut psikiater bersertifikat Margaret Seide, MD, "menjadi gender fluid berarti Anda tidak memiliki jenis kelamin tertentu atau posisi tertentu dalam spektrum gender."⁷⁵

6. Agender

Agender berarti seseorang yang tidak mengidentifikasi dengan jenis kelamin apa pun, Mereka tidak merasa sebagai laki-laki atau perempuan. Agender juga bisa berarti bebas gender, kosong gender, atau tanpa gender. Secara harfiah berarti "tanpa gender", menjadi agender terkadang dipahami sebagai pilihan untuk tidak membeli es krim. Mereka yang tidak mengidentifikasi salah satu gender disebut sebagai agender oleh Kamus Bahasa Inggris Oxford. Tidak mempunyai gender atau tidak memiliki gender dapat digunakan di sini. Meskipun demikian, agender juga dapat merujuk pada tidak adanya definisi gender atau identifikasi sebagai netral gender.⁷⁶

Istilah agender, seperti kebanyakan istilah yang kita gunakan untuk merujuk pada gender, masih sangat baru. Tentu saja, hal ini tidak berarti bahwa identitas-identitas tersebut merupakan identitas baru atau bahwa identitas individu-individu tersebut belum ada sebelum berkembangnya bahasa yang kita gunakan untuk mengidentifikasi mereka.

Istilah agender pertama kali digunakan secara online, menurut catatan! Di forum UseNet di Internet, ia lahir pada tahun 2000. "Gambar tidak bisa berupa objek fisik, gender, atau seksual karena Tuhan tidak berbentuk dan agender," kata seorang peserta percakapan di ruang obrolan alt.messianic.

⁷⁴ Fatwa Nurul Hakim, "Internalisasi Nilai Kesetaraan Gender Di Era Otonomi Daerah," 2019, 279–88.

⁷⁵ Hakim.

⁷⁶ Hana Nurisman, "Peran Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan Dan Keadilan Gender" 4, no. 1 (2024): 1–11.

7. Gendervoid

Gendervoid adalah istilah yang mirip dengan agender, tetapi secara khusus mengacu tidak hanya pada kurangnya identitas gender, tetapi juga rasa kehilangan atau kekosongan karena tidak merasakan identitas gender tersebut. Bagi orang yang gendervoid, mereka merasa seperti tidak dapat merasakan jenis kelaminnya. Beberapa orang yang mengidentifikasi dirinya sebagai gender non-conforming percaya bahwa mereka tidak memiliki identitas gender yang stabil dan konsisten. Mereka memiliki perasaan netral gender atau hampa. Laki-laki dan perempuan non-biner tidak sama dengan orang yang tidak memiliki gender.

Istilah “gendervoid” menggambarkan seseorang yang tidak memiliki identitas gender sama sekali. Pengalaman masyarakat mengenai kekosongan gender bisa berbeda-beda. Beberapa orang mungkin mengalami perubahan di mana mereka kadang-kadang merasakan kehadiran gender dan ketiadaan gender di lain waktu. Kata agender, yang menggambarkan orang-orang yang tidak mengidentifikasi diri dengan suatu gender atau yang merasa bahwa gender sama sekali tidak ada hubungannya dengan mereka, sering kali dikaitkan dengan gendervoid. Identitas gendervoid, berbeda dengan identitas gender lainnya seperti transgender atau non-biner, masih relatif tidak dikenal dan kurang terlihat di masyarakat. Agar dapat hidup secara tulus dan nyaman dengan identitas mereka, orang-orang yang tidak memiliki gender memerlukan rasa hormat, penerimaan, dan pemahaman yang sama dari masyarakat seperti mereka.⁷⁷

3. Kesetaraan gender dalam perspektif Judith Butler

Salah satu jenis hak asasi manusia yang dihargai keberadaannya saat ini adalah kesetaraan gender. Perserikatan Bangsa-Bangsa mendefinisikan kesetaraan gender sebagai gagasan bahwa perempuan dan anak perempuan hidup dalam kondisi yang sama dan diberi kesempatan yang sama dengan tujuan yang sama untuk mewujudkan potensi dan hak asasi manusia setiap orang. Hal ini dapat

⁷⁷ Wardhani, “PERAN PEMBENTUKAN KOMITE SOSIAL KESETARAAN GENDER PEREMPUAN DALAM ISU STEREOTIP.”

menguntungkan politik negara, perekonomian, masyarakat, dan budaya. Tokoh politik, aktivis sosial, feminis, dan bahkan pejabat negara sering kali mengadvokasi kesetaraan gender.⁷⁸

Dalam konteks praktis, kata kesetaraan gender biasanya dipahami sebagai “ketidaksetaraan” yang dihadapi perempuan. Oleh karena itu, frasa “kesetaraan gender” seringkali berkonotasi dengan perlakuan tidak adil, subordinasi, penindasan, dan sejenisnya terhadap perempuan. Dalam wacana feminis, ada dua organisasi besar yang membahas gagasan kesetaraan gender, dan keduanya saling bertentangan. Pertama, ada sekelompok feminis yang berpendapat bahwa karena gender adalah konstruksi sosial, maka peran dan perilaku gender dalam masyarakat tidak boleh dibeda-bedakan berdasarkan gender. Beberapa kelompok feminis percaya bahwa disparitas gender akan selalu mempengaruhi bagaimana konsep gender dikonstruksikan dalam interaksi sosial, artinya akan selalu ada banyak bentuk pekerjaan yang distereotipkan berdasarkan gender. Kedua pasangan. Perbedaan ini didasarkan pada banyak teori dan ideologi, yang menawarkan kerangka kerja untuk mengkaji berbagai gender juga.⁷⁹

Analisis gender merupakan proses sistematis yang dirancang untuk mengidentifikasi dan memahami penerapan pekerjaan/peran laki-laki dan perempuan, mengakomodasi akses dan kontrol dalam proses pembangunan dan manfaat utama yang dituju, serta pola hubungan yang berkelanjutan antara laki-laki dan perempuan. wanita. Dalam proses analisis gender, faktor-faktor lain seperti kelas sosial, ras, dan stereotip gender juga dipertimbangkan. Studi gender lebih fokus pada maskulinitas atau feminitas seseorang. Peran gender bukanlah konsep yang terisolasi; hal-hal tersebut terkait dengan identitas dan perbedaan kualitas yang dimiliki oleh masyarakat antara laki-laki dan perempuan. Kualitas-kualitas ini melampaui perbedaan fisik sederhana dan mencakup semua norma sosial dan budaya yang lazim dalam masyarakat dan berperan.⁸⁰

⁷⁸ Audina, “Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”

⁷⁹ Salviana, “Pengertian Gender Dan Sosialisasi Gender.”

⁸⁰ Santy, “Identitas Gender Dan Seksualitas Melalui Performativitas: Menyambut Keragaman Identitas Gender.”

Kesetaraan gender diakibatkan oleh perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan tersebut pada gilirannya menimbulkan berbagai ketidakadilan. Adapun kesetaraan gender memiliki makna terealisasinya kesamaan kondisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan ikut andil dalam pembangunan, politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, pertahanan dan keamanan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut. Agar perempuan dan laki-laki dapat berpartisipasi secara setara dalam pembangunan, politik, ekonomi, isu-isu sosial, budaya, pendidikan, pertahanan, dan keamanan sekaligus memperoleh manfaat dari pembangunan tersebut, mereka harus diberikan kesempatan dan hak yang sama sebagai manusia. Hal ini dikenal sebagai kesetaraan gender.⁸¹

Kesetaraan gender dilihat melalui kacamata filsuf feminis postmodern Judith Butler, yang mempertanyakan konsepsi gender esensialis dan biner. Demarkasi kategori gender yang ketat dan biner antara laki-laki dan perempuan dikritik oleh Butler. Menurutnya, perbedaan tersebut merupakan konstruksi masyarakat yang mendiskriminasi dan meminggirkan manifestasi gender yang menyimpang dari harapan tersebut. Penghormatan terhadap beragam identitas dan manifestasi gender sangat penting bagi kesetaraan gender.⁸²

Dalam buku "Pengertian Gender dan Sosialisasi Gender" Judith Butler mempertanyakan anggapan bahwa heteroseksualitas adalah standar yang harus dipatuhi. Menurutnya, heteronormativitas adalah sistem yang meminggirkan orang-orang yang mengidentifikasi diri berbeda identitas gender dan orientasi seksual serta melanggengkan ketidakadilan gender. Penghormatan terhadap keragaman orientasi seksual dan identitas gender merupakan komponen penting dalam kesetaraan gender. Menurut Judith Butler, gender adalah sesuatu yang terus-menerus diekspresikan melalui tindakan pribadi, pola bicara, pakaian, dan perilaku. Hal ini menunjukkan bahwa gender dibuat secara sosial, bukan bersifat inheren atau

⁸¹ Nurisman, "Peran Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan Dan Keadilan Gender."

⁸² Wardhani, "PERAN PEMBENTUKAN KOMITE SOSIAL KESETARAAN GENDER PEREMPUAN DALAM ISU STEREOTIP."

alamiah. Individu harus diperbolehkan untuk mengekspresikan gendernya tanpa dibatasi oleh konvensi yang ketat berkat kesetaraan gender.⁸³

Dalam buku “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA” Judith Butler mengkritik cara standar gender di negara-negara patriarki yang mendorong ketidaksetaraan dan subjugasi terhadap laki-laki dan perempuan. Untuk menciptakan ruang bagi kesetaraan yang lebih besar di berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, dan politik, kesetaraan gender harus menghadapi hierarki yang ada dan hubungan kekuasaan yang tidak setara. Dalam perjuangan untuk kesetaraan gender, Butler menyoroti pentingnya mempertimbangkan interseksionalitas yakni cara gender berinteraksi dengan identitas lain seperti ras, kelas, disabilitas, dan sebagainya mempertimbangkan.⁸⁴

Untuk mencapai kesetaraan gender, perlu mempertimbangkan kekayaan dan keragaman pengalaman individu. Sudut pandang Judith Butler mengenai kesetaraan gender sering kali bertentangan dengan pemikiran konvensional yang tidak fleksibel dan menciptakan ruang bagi pemahaman yang lebih menerima, inklusif, dan sopan terhadap keragaman identitas dan ekspresi gender yang melampaui standar yang berlaku.⁸⁵

Dalam buku “Problem Definisi Gender; kajian atas konsep nature dan nurture” Judith Butler menantang anggapan bahwa identitas gender adalah konsep yang konstan, logis, dan stabil. Menurutnya, pendefinisian gender seseorang merupakan proses berkesinambungan yang melibatkan “menjadi”. Fleksibilitas dan ketidakstabilan identifikasi gender harus diperhitungkan demi kesetaraan gender. Butler tidak setuju dengan naturalisme, yang berpendapat bahwa gender adalah bawaan dari seks biologis atau sesuatu yang terjadi secara alami. Ia menggarisbawahi bahwa gender merupakan konstruksi budaya yang bervariasi

⁸³ Salviana, “Pengertian Gender Dan Sosialisasi Gender.”

⁸⁴ Dwi Noviani, “PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KESETARAAN GENDER DALAM KELUARGA” 1, no. 11 (2022).

⁸⁵ Salviana, “Pengertian Gender Dan Sosialisasi Gender.”

tergantung situasi. Anggapan naturalistik yang mendukung ketimpangan harus dilawan dengan kesetaraan gender.⁸⁶

Dalam buku "PERAN PEMBENTUKAN KOMITE SOSIAL KESETARAAN GENDER PEREMPUAN DALAM ISU STEREOTIP" Judith Butler menganjurkan untuk membongkar dan membedah norma-norma gender konvensional seperti laki-laki dan perempuan, serta maskulin dan feminin. Menurutnya, pengklasifikasian tersebut menjadi batasan yang meminggirkan masyarakat yang tidak termasuk di dalamnya. Kesetaraan gender perlu menciptakan ruang bagi berbagai ekspresi gender yang tidak sesuai dengan kategori-kategorinya. Menurut Butler, gender adalah topik perdebatan dan negosiasi di mana orang terus-menerus menciptakan dan mengekspresikan gender mereka sebagai respons terhadap ekspektasi masyarakat dan budaya.⁸⁷

Kesetaraan gender tidak bisa menegakkan norma-norma yang ketat dan berlaku universal, sebaliknya, mereka harus mengakui dan menghormati proses negosiasi ini. Butler mendukung taktik subversif dengan menggunakan parodi gender untuk menyerang dan membongkar standar gender konvensional. Kesetaraan yang lebih besar dan ekspresi gender yang lebih luas dapat terwujud jika kita mencemooh dan menumbangkan konvensi-konvensi ini. Secara keseluruhan, sudut pandang Butler menyajikan sudut pandang yang mempertanyakan sekaligus mendorong perluasan pengetahuan tentang gender dan kesetaraan gender di luar batas normatif yang diterima.⁸⁸

⁸⁶ Khuza'i, "Problem Definisi Gender: Kajian Atas Konsep Nature Dan Nurture."

⁸⁷ Wardhani, "PERAN PEMBENTUKAN KOMITE SOSIAL KESETARAAN GENDER PEREMPUAN DALAM ISU STEREOTIP."

⁸⁸ Nurisman, "Peran Pemberdayaan Perempuan Untuk Kesetaraan Dan Keadilan Gender."